



**TAHUN
2024
(Audited)**



CaLK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



STASIUN PSDKP KUPANG

Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak
Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT 85231
Telp. (0380) 890 456 Email: psdkp.kupang@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengawasan SDKP Kupang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Kupang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemangku kepentingan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Kupang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Kupang, 9 Mei 2025
Kepala Stasiun PSDKP Kupang

Nu'man Najib, S.St.Pi.
NIP. 198108212003121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Pernyataan Tanggung Jawab.....	4
Ringkasan.....	5
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	8
II. Neraca.....	9
III. Laporan Operasional.....	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
A. Penjelasan Umum.....	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	32
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	45
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	60
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	67
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	71
G. Lampiran dan Daftar.....	76

STASIUN PSDKP KUPANG
JALAN YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, ALAK,
KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TELEPON/FAXIMILE 0380-890456

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Kupang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Kupang, 9 Mei 2025
Kepala Stasiun PSDKP Kupang,

Mu'man Najib, S.St.Pi
NIK. 198108212003121003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp22,350,271. Penjelasan lengkap terdapat pada bab penjelasan pos-pos di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagian Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23,654,469,720 atau mencapai 83,13 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp28,455,309,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp12,654,173,230 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp701,914,262; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap sebesar Rp11,952,258,968 yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan; Aset Lainnya sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp14,608,907 dan Rp12,639,564,323.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6,739,272, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp(24,281,485,510) sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(24,274,746,238). Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(84,629,001), dan Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp(24,359,375,239) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(24,359,375,239).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp13,223,492,007 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(24,359,375,239), Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp143,328,106, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp23,632,119,449 serta kenaikan Ekuitas sebesar Rp583,927,684 sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp12,639,564,323.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN PSDKP KUPANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024		% thd Angg	31 DESEMBER 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	22,350,271	#DIV/0!	70,014,382
JUMLAH PENDAPATAN		-	22,350,271	#DIV/0!	70,014,382
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	7,059,355,000	7,050,495,757	99.87	6,124,706,779
Belanja Barang	B.4	16,434,308,000	15,759,095,682	95.89	19,910,453,618
Belanja Modal	B.5	4,961,646,000	844,878,281	17.03	1,369,240,730
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		
JUMLAH BELANJA		28,455,309,000	23,654,469,720	83.13	27,404,401,127

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

STASIUN PSDKP KUPANG NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	1,850,000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	(9,250)
Uang muka belanja (prepayment)	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	701,914,262	642,833,059
Jumlah Aset Lancar		701,914,262	644,673,809
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	313,440,825	313,440,825
Peralatan dan Mesin	C.15	30,891,161,825	29,832,032,976
Gedung dan Bangunan	C.16	7,745,770,254	7,236,950,407
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	1,942,265,392	1,942,265,392
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	98,390,000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.18	(28,940,379,328)	(26,830,228,595)
Jumlah Aset Tetap		11,952,258,968	12,592,851,005
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	114,654,470
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.23	-	(114,654,470)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		12,654,173,230	13,237,524,814
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	14,608,907	14,032,807
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14,608,907	14,032,807
JUMLAH KEWAJIBAN		14,608,907	14,032,807
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	12,639,564,323	13,223,492,007
JUMLAH EKUITAS		12,639,564,323	13,223,492,007
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12,654,173,230	13,237,524,814

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN PSDKP KUPANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	6,739,272	21,125,383
JUMLAH PENDAPATAN		6,739,272	21,125,383
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	7,050,495,757	6,122,856,779
Beban Persediaan	D.3	262,287,106	234,309,153
Beban Barang dan Jasa	D.4	9,668,744,928	14,190,921,723
Beban Pemeliharaan	D.5	2,979,464,961	3,271,057,013
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2,838,815,594	2,264,998,313
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7		-
Beban Bantuan Sosial	D.8		-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1,481,653,289	1,934,127,063
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	23,875	9,250
JUMLAH BEBAN		24,281,485,510	28,018,279,294
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(24,274,746,238)	(27,997,153,911)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		13,760,999	48,888,999
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(98,390,000)	(125,361,684)
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(84,629,001)	(76,472,685)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(24,359,375,239)	(28,073,626,596)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(24,359,375,239)	(28,073,626,596)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
EKUITAS AWAL	E.1	13,223,492,007	14,078,319,416
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(24,359,375,239)	(28,073,626,596)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	143,328,106	(120,906,308)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	44,370,800	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	98,948,056	(120,906,308)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	9,250	-
JUMLAH		(24,216,047,133)	(28,194,532,904)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	23,632,119,449	27,339,705,495
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(583,927,684)	(854,827,409)
EKUITAS AKHIR	E.5	12,639,564,323	13,223,492,007

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun PSDKP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024, disebutkan salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.

Visi KKP adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi KKP

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal PSDKP yaitu “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

Stasiun PSDKP Kupang merupakan salah satu UPT PSDKP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan memiliki wilayah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTT. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang (sebelumnya Satuan Kerja PSDKP Kupang) terletak di Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Stasiun PSDKP Kupang dipimpin oleh Kepala Stasiun yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. Kepala Stasiun membawahi Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Usaha, Pelaksana Koordinasi Urusan Sarana dan Prasarana, Pelaksana Koordinasi

Urusan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Stasiun PSDKP Kupang serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan, maka dirumuskan Visi Stasiun PSDKP Kupang, sebagai berikut:

“Perairan Lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang Bebas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”

Sejalan dengan visi Stasiun PSDKP Kupang, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang akan dicapai. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Kupang, sebagai berikut:

- 1) *Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang*
- 2) *Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang*
- 3) *Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang*

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Kupang telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Dalam perspektif BSC Stasiun PSDKP

Kupang telah menetapkan 10 Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽²⁾ Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan; ⁽⁵⁾ Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; ⁽⁷⁾ Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan; ⁽⁸⁾ Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas; ⁽⁹⁾ Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas; ⁽¹⁰⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Kupang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPT Stasiun PSDKP Kupang didukung oleh sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana yang diperlukan. SDM Stasiun PSDKP Kupang terdiri dari pegawai PNS dan PPNNP sebanyak 75 orang yang tersebar di UPT, Satwas, dan Wilker dengan perincian:

- Stasiun PSDKP Kupang dan Pos Atapupu sebanyak 24 PNS, 5 PPPK, 7 PPNNP, dan 10 PJLP;
- Satwas SDKP Flores Timur sebanyak 4 PNS dan 1 PPNNP;
- Wilker PSDKP Maumere sebanyak 4 PNS;
- Satwas Sumba Timur sebanyak 2 PNS dan 1 PPNNP;
- Kapal Pengawas Hiu Macan 03 sebanyak 12 PNS, 1 PPNNP, dan 4 PPPK;

Sementara itu, untuk sarana dan prasarana yang dimiliki

antara lain: Gedung Kantor, Rumah Dinas, Mess Stasiun PSDKP Kupang, Gedung Kantor Satwas Flores Timur, Gedung Kantor Satwas PSDKP Sumba Timur, Gedung Kantor Wilker PSDKP Atapupu, Gedung Kantor Wilker PSDKP Maumere, Kapal Pengawas Hiu Macan 03, Speedboat Napoleon 054, Speedboat Hiu Biru 04 dan Rubberboat.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang meliputi seluruh wilayah provinsi NTT, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Stasiun PSDKP Kupang dibantu oleh dua Satwas SDKP, yaitu Flores Timur dan Sumba Timur, serta tiga Wilker yaitu Labuan Bajo, Atapupu, dan Maumere.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang didirikan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kupang merupakan pendukung implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kupang diharapkan laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Kupang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Pengawasan SDKP Kupang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Kupang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Kupang. Disamping itu, dalam penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Kupang adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara

proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Pencatatan Nilai Persediaan mengakomodir penggunaan metode FIFO sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Kebijakan Akuntansi persediaan yang diambil oleh KKP berdasarkan hasil keputusan *tripartite* yaitu :
 1. Persediaan Suku Cadang Kapal

Suku cadang kapal sesuai karakteristiknya tetap dicatat sebagai persediaan;

KKP perlu membuat kartu kendali persediaan suku cadang serta melakukan stok opname fisik pada akhir periode baik yang ada di gudang maupun yang ada di kapal.
 2. Persediaan BBM Kapal

Pencatatan persediaan BBM Kapal dikeluarkan dari Neraca namun perlu diungkap dalam CaLK KKP;

BBM yang berada di kapal diperlakukan sebagai beban persediaan pada saat BBM diisi ke tangki kapal;

Mengutip pernyataan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tingkat akurasi hasil stok opname fisik BBM di kapal tergantung pada posisi dan kondisi kapal;

Cost untuk menghitung persediaan BBM Kapal lebih besar dibandingkan benefit dari pencatatan BBM Kapal, karena secara substansi KKP tidak memiliki gudang penyimpanan BBM kapal;

KKP perlu membuat aturan terkait mekanisme pengendalian penggunaan BBM oleh Kapal, untuk mencegah penyalahgunaan BBM Kapal sebagai laporan manajerial;

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan

nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan

untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam

Panjang

jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya***e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
-----------------------------------	-----------------------------

<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama tahun anggaran 2024, Stasiun PSDKP Kupang telah melaksanakan 11 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya *Automatic Adjustment*, membuka blokir anggaran, pemutakhiran data revisi POK, mengupdate halaman III DIPA, buka blokir anggaran AA, revisi antar jenis belanja, revisi antar KRO NonPN, dan Pemutakhiran KPA. Pagu awal sebesar Rp28.753.309.000 setelah revisi menjadi sebesar Rp28.455.309.000.

Berikut penjelasan atas detail revisi yang telah dilaksanakan sampai akhir tahun 2024:

- a. Revisi pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024. Revisi ini untuk menyediakan anggaran cadangan atau Automatic Adjustment dengan cara memblokir Sebagian anggaran yang dimiliki UPT;
- b. Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan I;
- c. Revisi ketiga dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan II;
- d. Revisi keempat dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2024. Revisi ini merupakan revisi kewenangan DJA untuk buka blokir anggaran;
- e. Revisi kelima dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan II;
- f. Revisi keenam dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan III;
- g. Revisi ketujuh disahkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pergeseran antar jenis belanja pada RO Perawatan Armada;
- h. Revisi kedelapan disahkan pada tanggal 06 November 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran POK dan rekomposisi AA untuk pemenuhan kebutuhan operasi kapal pengawas;
- i. Revisi kesembilan disahkan pada tanggal 19 November 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pergeseran antar RO Non PN, serta antar jenis belanja untuk optimalisasi anggaran;

- j. Revisi kesepuluh disahkan pada tanggal 11 Desember 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan IV;
- k. Revisi kesebelas disahkan pada tanggal 27 Desember 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran kewenangan KPA.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	31 DESEMBER 2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	7,357,355,000	7,059,355,000
Belanja Barang	16,486,954,000	16,434,308,000
Belanja Modal	4,909,000,000	4,961,646,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	28,753,309,000	28,455,309,000

Revisi di atas antara lain berupa blokir AA (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp5,446,735,000, buka blokir anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp7.190.000, pemutakhiran atas revisi-revisi POK dan Halaman III DIPA, Buka Blokir Anggaran AA sebesar Rp676.843.000, revisi antar jenis belanja (52 ke 53) sebesar Rp52.646.000 untuk pemenuhan kekurangan anggaran belanja modal serta optimalisasi sisa anggaran belanja barang, dan revisi antar KRO NonPN.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun PSDKP Kupang terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang

pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 5 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Kupang dengan pagu mencapai Rp16.406.622.000 dan realisasi sebesar Rp11.624.342.766 dengan rincian sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%	
2350.QDD	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	300,000,000	299,952,651	99.98					
2350.QDD.001	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	300,000,000	299,952,651	99.98	Kelompok Masyarakat	3	3	100.00	
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	7,641,667,000	7,640,890,176	99.99					
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	7,164,267,000	7,163,821,457	99.99	Operasi	40	40	100.00	
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	477,400,000	477,068,719	99.93	Operasi	30	30	100.00	
2350.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	4,350,000,000	-	-					
2350.RAL.002	Speedboat Pengawas	4,350,000,000	-	-	Unit	1	0	-	Diblokir
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2,958,955,000	2,651,785,799	89.62					
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	2,958,955,000	2,651,785,799	89.62	Unit	5	5	100.00	Sebagian diblokir
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	849,000,000	801,613,987	94.42					
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	700,000,000	670,776,199	95.83	Lembaga	13	13	100.00	Sebagian diblokir
2352.QIC.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	149,000,000	130,837,788	87.81	Lembaga	45	45	100.00	Sebagian diblokir
2353.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	307,000,000	230,100,153	74.95					
2353.QIC.004	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	307,000,000	305,486,287	99.51	Lembaga	20	20	100.00	
TOTAL		16,406,622,000	11,624,342,766	70.85					

Pada periode pelaporan, pada TA 2024 di Stasiun PSDKP Kupang memiliki anggaran yang diblokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp4.769.892.000 sehingga pagu efektif yang dapat direalisasikan dari total pagu Rp28.455.309.000 yaitu sebesar Rp23.685.417.000. Dari total pagu yang diblokir, sebagian besar terdapat pada kegiatan prioritas nasional dengan besaran pagu yang diblokir yaitu sebesar Rp4.700.000.000. RO RAL.002 merupakan RO yang seluruh anggarannya diblokir

sehingga tidak ada realisasi output pada tahun 2024.

Realisasi

Pendapatan

Rp22,350,271

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Stasiun PSDKP Kupang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22,350,271 dan Rp70,014,382. Rincian pendapatan Stasiun PSDKP Kupang adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	22,350,271	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	13,760,999	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	6,739,272	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1,850,000	-
Pendapatan Denda Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	22,350,271	-

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2024 sebesar Rp22,350,271. Dari perbandingan antara 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2024, terdapat penurunan nilai penerimaan. Penerimaan pada 31 Desember 2024 tersebut berasal dari:

- a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang berasal dari hasil lelang peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan 1 Paket inventaris kantor milik Stasiun PSDKP Kupang dalam kondisi rusak berat senilai **Rp2,000,999** dengan Nomor Risalah 21/14.05/2024-01 tanggal 12 Januari 2024 dan hasil lelang bongkaran Replating Kapal Pengawas Hiu Macan 03 senilai **Rp11,760,000** dengan Nomor Risalah

1539/09.01/2024-01 tanggal 8 Oktober 2024;

- b. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yaitu sewa Rumah Negara milik Stasiun PSDKP Kupang sebesar **Rp6,739,272** yang dibayar perbulan pada SPM Gaji (memotong Gaji pegawai yang bersangkutan). Pengenaan sewa rumdin ini berdasarkan pada Surat Keputusan KPA Stasiun PSDKP Kupang Nomor: KEP.016/KPA-PSDKPSta.3/I/2024 Tentang Penetapan Pengguna/Penanggung Jawab Rumah Negara pada Stasiun PSDKP Kupang; dan
- c. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari pengembalian atas temuan BPK berupa kelebihan bayar belanja pegawai yang sedang tugas belajar TA 2023 senilai **Rp1.850,000** dengan NTPN A104E2G4VPICRSJE dengan tanggal bayar 26 April 2024.

Sedangkan pada 31 Desember 2023 berasal dari:

- a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin merupakan hasil lelang peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan 1 Paket Bongkaran Hasil Perbaikan Kapal Hiu Macan 03 (terdiri dari 1 paket bongkaran replating KP Hiu Macan 03 dan 2 unit genset KP Hiu Macan 03) senilai **Rp40,000,000** dengan Nomor Risalah 1306/37/2023 tanggal 30 Agustus 2023, dan 1 Paket Peralatan dan Mesin (Motor Tempel Speedboat, Perahu Karet, Alat Pengolah Air Laut) dan 1 unit Sepeda Motor senilai **Rp8,888,999** dengan Nomor Risalah Lelang: 221/69/2023 tanggal 26 Juni 2023;

- b. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yaitu sewa Rumah Negara milik Stasiun PSDKP Kupang sebesar **Rp6,739,272** yang dibayar perbulan pada SPM Gaji (memotong Gaji pegawai yang bersangkutan). Pengenaan sewa rumdin ini berdasarkan pada Surat Keputusan KPA Stasiun PSDKP Kupang Nomor: KEP.012/KPA-PSDKPSta.3/I/2023 Tentang Penetapan Pengguna/Penanggung Jawab Rumah Negara pada Stasiun PSDKP Kupang;
- c. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah yang berasal dari denda atas keterlambatan pekerjaan pengadaan listrik darat senilai **Rp352,148** dengan NTPN DD31F0N9VRFE1B40 dan tanggal bayar 24 Agustus 2023;
- a. Pendapatan Denda Lainnya sebesar **Rp14,033,963** yang berasal dari pendapatan fungsional (sanksi administrasi pada pelaku usaha yang tidak tertib) dan dibayarkan dengan penyetoran langsung ke negara dengan NTPN 964AF7QLUFMB7T0U pada tanggal 15 April 2023.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	22,350,271	70,014,382	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,739,272	6,739,272	-
Pendapatan Denda Lainnya	-	14,033,963	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	1,850,000	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	13,760,999	48,888,999	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	352,148	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah	22,350,271	70,014,382	-

Rincian Pendapatan Sampai Akhir Tahun 2024

URAIAN PENDAPATAN	Nominal
Penerimaan Negara Bukan Pajak	22,350,271
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,739,272
Pendapatan Denda Lainnya	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	1,850,000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	13,760,999
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-

Realisasi

Belanja Negara
Rp23,654,469,720
0

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23,654,469,720 atau 83,13% dari anggaran belanja sebesar Rp28,455,309,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7,059,355,000	7,050,495,757	99.87
Belanja Barang	16,434,308,000	15,759,095,682	95.89
Belanja Modal	4,961,646,000	844,878,281	17.03
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	28,455,309,000	23,654,469,720	83.13

Dibandingkan dengan 31 Desember TA 2023, Realisasi Belanja 31 Desember TA 2024 secara keseluruhan lebih rendah dalam nominal maupun persentase realisasi. Penjelasan untuk hal ini adalah:

1. Untuk belanja pegawai, terdapat kenaikan realisasi anggaran yang juga diimbangi naiknya pagu anggaran daripada tahun lalu karena adanya kenaikan gaji berkala pegawai, dan kenaikan gaji berdasarkan PP terbaru mengenai gaji PNS, serta pembayaran tunjangan 13 dan 14 sebesar 100% (tunjangan 13 dan 14 TA 2023 hanya 50%). Jumlah PNS Stasiun PSDKP Kupang saat ini sebanyak 44 orang (1 orang golongan IV, 36 orang golongan III, dan 7 orang golongan II), dan 9 orang

PPPK (5 orang golongan IX, 1 orang golongan VII, dan 3 orang golongan V).

2. Untuk belanja barang terjadi penurunan nominal realisasi dibandingkan pada tahun 2023 disebabkan karena pada tahun ini terdapat penurunan target hari operasi kapal pengawas sehingga berdampak pada berkurangnya anggaran operasional kapal pengawas.
3. Untuk belanja modal mengalami penurunan realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun 2023. Menurunnya nilai realisasi anggaran disebabkan karena pada tahun 2024 terdapat anggaran pengadaan speedboat pengawas yang diblokir sebesar Rp4.100.000.000 sehingga anggaran tersebut tidak dapat terealisasi.

*Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	7,050,495,757	6,124,706,779	15.12
Belanja Barang	15,759,095,682	19,910,453,618	(20.85)
Belanja Modal	844,878,281	1,369,240,730	(38.30)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	23,654,469,720	27,404,401,127	(13.68)

Belanja

Pegawai

Rp7,050,495,757

B.3 Belanja Pegawai

2.

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7,050,495,757 dan Rp6,124,706,779. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai 31 Desember TA 2024 sebesar Rp7,050,495,757 (sebesar 99,87%), sementara pada 31 Desember TA 2023 sebesar Rp6,124,706,779 (sebesar 99,98%). Hal ini disebabkan:

1. Untuk belanja pegawai 2024 terdapat kenaikan realisasi anggaran yang juga diimbangi naiknya pagu anggaran daripada tahun lalu karena adanya kenaikan gaji berkala pegawai, dan kenaikan gaji berdasarkan PP terbaru mengenai gaji PNS (kenaikan 8%), dan pembayaran tunjkin 13 dan 14 sebesar 100%.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,997,888,963	2,927,326,925	2.41
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	455,865,998	158,133,920	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	345,770,000	240,530,000	43.75
Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan	3,251,712,148	2,799,390,826	16.16
Jumlah Belanja Kotor	7,051,237,109	6,125,381,671	15.12
Pengembalian Belanja Pegawai	(741,352)	(674,892)	9.85
Jumlah Belanja	7,050,495,757	6,124,706,779	15.12

Pada realisasi tahun 2024 terdapat pengembalian belanja tunjangan umum PNS berupa pengembalian atas kelebihan bayar tunjangan umum PNS yang sedang Tugas Belajar sebesar Rp555.000 telah dilakukan pembayaran dengan NTPN EE8D00JUQKU78G0Q pada tanggal 26 April 2024, dan sebesar Rp185.000 telah dilakukan pembayaran dengan NTPN ADB560JUQSDRVSEFE pada tanggal 30 Desember 2024, serta pengembalian pembulatan gaji PNS dan PPPK sebesar Rp1.236 dan Rp116.

Sedangkan pada 2023 terdapat pengembalian gaji atas kelebihan bayar sebesar Rp674,700 dan pengembalian

yang berasal dari pembulatan gaji PNS sebesar Rp192.

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp15,759,095,68

2

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15,759,095,682 dan Rp19,910,453,618. Realisasi Belanja Barang TA 2024 lebih rendah dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini karena pada tahun ini terdapat penurunan target hari operasi kapal pengawas sehingga berdampak pada berkurangnya anggaran operasional kapal pengawas, selain itu juga terdapat anggaran belanja barang yang diblokir sehingga tidak dapat direalisasikan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,317,791,199	1,367,988,575	(3.67)
Belanja Barang Non Operasional	7,638,362,385	12,321,321,746	(38.01)
Belanja Jasa	712,955,154	503,758,031	41.53
Belanja Pemeliharaan	3,023,071,755	3,248,869,249	(6.95)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,840,460,989	2,264,999,312	25.41
Belanja Barang Persediaan	229,039,505	203,517,704	12.54
Jumlah Belanja Kotor	15,761,680,987	19,910,454,617	(20.84)
Pengembalian Belanja	(2,585,305)	(999)	-
Jumlah Belanja	15,759,095,682	19,910,453,618	(20.85)

Selama periode pelaporan TA 2024, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp2.585.305 yang dijelaskan dalam tabel berikut:

URAIAN	Nominal	Tanggal Dibayar	NTPN
Lebih Bayar Belanja Perkantoran	939,910	22 November 2024	A2F7145KQ5MTREJR
Lebih Bayar Belanja Perdin	25,000	11 Juli 2024	E6BC55UFPN1G1594
Lebih Bayar Belanja Perdin	1,620,395	18 Desember 2024	80BAB397AC1ELT6Q
Total Pengembalian	2,585,305		

Lebih bayar belanja perkantoran merupakan pendobelan SPJ sehingga dilakukan pengembalian atas SPJ double tersebut. Lebih bayar perdin merupakan kesalahan perhitungan rincian sehingga dilakukan pengembalian sesuai nominal kelebihannya.

Stasiun PSDKP Kupang memiliki 1 unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan KP. Hiu Macan 03. Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Pengawas tersebut pada awal tahun 2024 adalah sebesar Rp4,836,397,000 dan pada akhir periode pelaporan, anggaran BBM menjadi 5,465,160,000. Realisasi BBM Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Mutasi pemakaian hingga 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut

Bulan	Tanggal BBM Awal	Sisa Volume BBM Awal (Liter)	Jumlah Pengisian (Liter)	Pemakaian (Liter)	Tanggal BBM Akhir	Jumlah Sisa BBM Akhir (Liter)	No
a	b	c	d	e	f	g = (c+d-e)	
Desember	30 November 2023	41,000	39,050	55,750	29 Desember 2023	24,300	208/HMC.03.3.2/
Januari	29 Desember 2023	24,300	-	4,400	31 Januari 2024	19,900	018/HMC.03.3.2/
Februari	31 Januari 2024	19,900	20,000	4,200	29 Februari 2024	35,700	039/HMC.03.3.2/
Maret	29 Februari 2024	35,700	20,000	37,850	29 Maret 2024	17,850	067/HMC.03.3.2/
April	29 Maret 2024	17,850	30,000	450	30 April 2024	47,400	092/HMC.03.3.2/
Mei	30 April 2024	47,400	30,000	36,500	31 Mei 2024	40,900	331/HMC.03.3.2/
Juni	31 Mei 2024	40,900	35,000	57,900	28 Juni 2024	18,000	362/HMC.03.3.2/
Juli	28 Juni 2024	18,000	-	-	31 Juli 2024	18,000	376/HMC.03.3.2/
Agustus	31 Juli 2024	18,000	30,000	2,280	31 Agustus 2024	45,720	392/HMC.03.3.2/
September	31 Agustus 2024	45,720	20,000	46,920	30 September 2024	18,800	411/HMC.03.3.2/
Oktober	30 September 2024	18,800	48,000	45,560	31 Oktober 2024	21,240	444/HMC.03.3.2/
November	31 Oktober 2024	21,240	65,000	60,640	29 November 2024	25,600	486/HMC.03.3.2/
Desember	29 November 2024	25,600	59,900	55,050	31 Desember 2024	30,450	527/HMC.03.3.2/

Belanja Modal
Rp844,878,281

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp844,878,281 dan Rp1,369,240,730. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 lebih rendah dibandingkan dengan 2023 disebabkan karena pada tahun 2024 terdapat anggaran belanja modal berupa pengadaan speedboat pengawas sebesar Rp4.100.000.000 yang diblokir sehingga tidak dapat direalisasikan anggarannya. Belanja modal tanah pada tahun 2024 tidak ada karena bangunan kantor Stasiun

PSDKP Kupang berdiri di atas tanah milik BKKPN Kupang (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun ini tidak ada karena sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	21,588,625	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331,283,349	243,697,640	35.94
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	513,594,932	908,512,436	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	195,442,029	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	844,878,281	1,369,240,730	(38.30)
Pengembalian	-	-	0.00
Jumlah Belanja	844,878,281	1,369,240,730	(38.30)

*Belanja Modal
Tanah Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp21,588,625. Realisasi pada TA 2024 lebih rendah dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat pembuatan sertifikat tanah di Sumba Timur sedangkan 2024 tidak ada belanja modal tanah karena aset gedung dan bangunan Stasiun PSDKP Kupang sebagian besar berdiri di atas tanah dengan status pinjam pakai dan untuk Satwas Flores Timur merupakan tanah hibah dari Pemerintah Daerah Sikka.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	21,588,625	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	21,588,625	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0.00
Jumlah Belanja	0	21,588,625	0.00

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp331,283,349*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp331,283,349 dan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp243,697,640. Hal ini disebabkan karena anggaran pengadaan perangkat pengolah data dan fasilitas perkantoran di TA 2024 meningkat dan dapat direalisasikan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Alat Pengolah Data	69,153,700	95,522,300	(27.60)
Kendaraan Roda 4	0	0	#DIV/0!
Fasilitas Perkantoran	79,113,900	78,381,090	0.93
Alat Cuci Tangan	0	19,941,150	(100.00)
Perlengkapan Kapal Pengawas	103,735,050	19,991,100	418.91
Pengadaan Perlengkapan Speedboat	0	0	#DIV/0!
Alat Selam dan Camera Under water	0	0	#DIV/0!
Pengadaan Tablet PC	37,668,600	0	#DIV/0!
Kamera Udara (Drone)	32,678,300	0	#DIV/0!
GPS	8,933,799	29,862,000	(70.08)
Jumlah Belanja Kotor	331,283,349	243,697,640	35.94
Pengembalian	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	331,283,349	243,697,640	35.94

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp513,594,932*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp513,594,932 dan Rp908,512,436. Realisasi Belanja Modal TA 2024 lebih rendah dikarenakan pada TA 2024 terdapat alokasi anggaran untuk belanja modal Gedung dan bangunan yang lebih rendah dari TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Gedung dan bangunan	513,594,932	908,512,436	(43.47)
Perencanaan Teknis Pembangunan Pos Pengawasan	61,050,000	97,147,200	(37.16)
Pembangunan Konstruksi Pos Pengawasan	407,188,201	692,575,900	(41.21)
Pengawasan Konstruksi Pos Pengawasan	37,258,260	59,564,820	(37.45)
Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Pos Pengawasan	8,098,471	59,224,516	(86.33)
Jumlah Belanja Kotor	513,594,932	908,512,436	(43.47)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	513,594,932	908,512,436	(43.47)

Belanja Gedung dan Bangunan pada periode TA 2024 yaitu Prasarana pengawasan SDKP pendukung berupa Pendopo yang dibangun di sebelah utara dari Kantor Stasiun PSDKP Kupang sesuai BAST Nomor: BAST.1747/PHO/PPK1-PSDKPSta.3/PL.430/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024.

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp195,442,029. Realisasi Belanja Modal JIJ TA 2024 lebih rendah dibandingkan dengan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan karena pada TA 2023 terdapat anggaran pembangunan listrik darat kapal pengawas sedangkan 2024 tidak ada alokasi anggaran untuk belanja modal JIJ.

*Perbandingan Realisasi
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	0	195,442,029
Konstruksi	0	195,442,029
Perencanaan dan Pengawasan	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	195,442,029
Pengembalian Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	0	195,442,029

*Belanja Modal
Lainnya Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Bulan 31 Desember TA 2024 dan Desember TA 2023*

Keterangan	DESEMBER TH 2024	TH 2023
Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	-	-
Bank BRI No. Acc 0039-01-003058-30-4 (BP)	-	-
Bank BRI No. Acc 0246-01-001037-30-9 (BPP Flotim)	-	-
Bank BRI No. Acc 0141-01-001102-30-0 (BPP Sumtim)	-	-
Jumlah	-	-

Saldo kas di bendahara pengeluaran pada akhir periode 2024 terdapat di rekening bank bendahara sebesar Rp0.

Pada akhir periode pelaporan, Stasiun PSDKP Kupang telah melakukan pengembalian TUP sebesar Rp32,861,418 pada tanggal 30 Desember 2024 dengan bukti nomor NTPN E70480JUQSDRVP6E.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. PNBP yang telah diterima oleh Stasiun PSDKP Kupang sudah disetorkan ke negara.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang PNBP

C.4 Piutang PNBP

Rp0

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp1.850.000. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Saldo Piutang PNBPN pada TA 2023, berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor T.1518/PSDKP.1/HP.520/IV/2024 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar tanggal 5 April 2024, bahwa terdapat temuan BPK RI terkait ketidaksesuaian pembayaran Belanja Pegawai atas pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar di TA 2023. Pada Stasiun PSDKP Kupang terdapat kelebihan bayar pada Tunjangan Umum pegawai yang sedang tugas belajar sehingga perlu dilakukan pengembalian atas kelebihan bayar tersebut. Pengembalian telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024 dengan NTPN A104E2G4VPICRSJE sebesar Rp1.850.000.

*Bagian Lancar**Tagihan**TP/TGR**Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

TPA Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
Rp0 per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar**

Piutang Tak Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per
Tertagih – 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar
Piutang Lancar Rp0 dan Rp(9,250). Penyisihan pada tahun 2023
Rp0 merupakan penyisihan dari pengembalian atas kelebihan bayar belanja pegawai TA 2023 (Temuan Pemeriksaan BPK).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

Belanja **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Dibayar di Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember
Muka Rp0 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Uang Muka **C.9 Uang Muka Belanja (Prepayment)**

Belanja Saldo Uang Muka Belanja (Prepayment) per tanggal 31
(prepayment) Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing
Rp0 adalah Rp0 dan Rp0. Uang muka belanja (*prepayment*) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima

jasa.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan
Rp697,163,052*

C.11 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp697,163,052 dan Rp642,833,059.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	43,566,550	32,843,351
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	653,596,502	609,989,708
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Jumlah	697,163,052	642,833,059

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	642,833,059
Mutasi tambah:	615,466,691
Pembelian	569,481,091
Reklasifikasi dari Aset	45,470,800
Reklasifikasi Masuk	514,800
Mutasi kurang:	(561,136,698)
Reklasifikasi ke Aset	(1,500,000)
Habis Pakai	(559,121,898)
Reklasifikasi keluar	(514,800)
Saldo per 31 Desember 2024	697,163,052

Pada periode akhir pelaporan terdapat reklasifikasi dari Aset sebesar Rp43,970,800 sesuai Surat nomor B.2881/PSDKPSta.3/HP.510/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 berupa tindak lanjut atas hasil pemantauan oleh inspektorat KKP berdasarkan Surat nomor R.346/ITJ.2/HP.550/X/2024 tanggal 4 September 2024 perihal Pemantauan Pengelolaan BMN Tahun Anggaran 2024 pada Stasiun PSDKP Kupang. Selain itu, juga terdapat reklasifikasi masuk-keluar persediaan sebesar Rp1,500,000 disebabkan karena kesalahan pencatatan kodefikasi yang sudah diperbaiki sesuai dengan Surat Nomor B.483/BMN-PSDKPSta.3/PL.110/VI/2024 pada tanggal 28 Juni 2024. Reklasifikasi keluar sebesar Rp514,800 merupakan reklasifikasi atas kesalahan penggunaan kodefikasi barang pada saat pemilihan rincian barang di Aplikasi SAKTI Modul Persediaan dan sudah diperbaiki sesuai dengan Surat Nomor B.482/BMN-PSDKPSta.3/PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.

Barang konsumsi untuk persediaan yang masih ada pada tanggal pelaporan antara lain Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Ordner Dan Map, Penggaris, Cutter (Alat Tulis Kantor), Alat Perekat, Staples, Isi Staples, Alat Tulis Kantor Lainnya,

Kertas HVS, Berbagai Kertas, Amplop, Kop Surat, Continuous Form, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, USB/Flash Disk, Harddisk Internal, Mouse, Bahan Komputer Lainnya. Sementara, suku cadang yang tersedia terdiri dari Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor sebesar Rp506,560,946, Suku Cadang Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebesar Rp147,035,556, yang tercantum pada Berita Acara Pemakaian Suku Cadang Kapal Pengawas Nomor: 529/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, Berita Acara Pemakaian Suku Cadang Speedboat Napoleon 054 Nomor: 246/NPL054-Sta.3/PL.430/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, Berita Acara Pemakaian Suku Cadang Speedboat Hiu Biru 04 Nomor: 260/HB04-Sta.3/PL.430/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, dan Berita Acara Pemakaian Suku Cadang Rubberboat Nomor: 012/RB-Sta.3-FLT/KW.310/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Rincian persediaan lengkap dapat dilihat pada laporan stok persediaan pada laporan SIMAK BMN. Semua barang persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan

Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

No	Debitur	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1		-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.13 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp9,250. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

C.15 Tanah

Rp313,440,825

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun PSDKP Kupang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp313,440,825 dan Rp313,440,825. Nilai aset tetap Tanah Stasiun PSDKP Kupang berasal dari hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk Kantor Satwas PSDKP Flores Timur, yang sudah diserahterimakan sejak tahun 2018. Pada tahun 2022 terdapat penambahan aset tanah Stasiun PSDKP Kupang yaitu dari Pemda Sikka dan Sumba Timur dengan nilai masing-masing Rp49,852,200 dan Rp192,000,000 sehingga nilainya bertambah Rp241,852,200. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	313,440,825
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Pengembangan nilai aset tanah	0
Hibah	0
Mutasi kurang:	0
Revaluasi aset	-
Saldo per 31 Desember 2024	313,440,825

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah 31 Desember 2024

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	192,5 m2	Satwas SDKP Flores Timur	50,000,000
2	3000 m2	Satwas SDKP Sumba Timur	209,588,625
3	1716 m2	Wilker PSDKP Maumere	53,852,200
Jumlah			313,440,825

*Peralatan dan**Mesin**Rp30,891,161,825*

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp30,891,161,825 dan Rp29,832,032,976. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	29,832,032,976
Mutasi tambah:	1,467,114,574
Pembelian	331,283,349
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan	209,700,000
Reklasifikasi masuk dari persediaan	1,500,000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Reklasifikasi masuk	406,485,725
Transfer Masuk	518,145,500
Mutasi kurang:	407,985,725
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
Reklasifikasi keluar ke Persediaan	1,500,000
Reklasifikasi keluar	406,485,725
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2024	30,891,161,825
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(26,949,954,101)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	3,941,207,724

Mutasi penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp1,467,114,574 diperoleh dari:

- Pembelian peralatan dan mesin selama TA 2024 sebesar Rp331.283.349 berupa pengadaan pengolah data, perlengkapan kapal pengawas, dan sarana pendukung pengawasan SDK dan SDP;
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya sebesar Rp209,700,000 berupa 2 unit kendaraan roda 4 yang berasal dari transfer masuk mengubah kondisi barang dari rusak berat menjadi baik sesuai Surat Nomor B.1999/PSDKPSta.3/PL.110/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 (Surat ubah kondisi barang), dan B.2144/PSDKPSta.3/PL.110/IX/2024 tanggal 18 September 2024 (Surat penggunaan kembali);
- Reklasifikasi masuk dan keluar sebesar Rp406,485,725 berupa koreksi perubahan pencatatan kode barang sesuai Surat Nomor B.481/BMN-PSDKPSta.3/PL.110/VI/2024 pada tanggal 24 Juni

2024;

- d) Transfer masuk sebesar Rp518,145,500 berupa 2 unit kendaraan roda dua dan 2 unit kendaraan roda 4 sesuai dengan BAST Nomor T.789/ITJ.0/PL.750/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.

*Gedung dan
Bangunan
Rp7,750,545,339*

- e) Reklasifikasi keluar dan masuk dari persediaan sebesar Rp1.500.000 berupa Koreksi Pencatatan Modul Aset Tetap & Modul Persediaan thermogun 1 unit dengan nomor B.482/BMN-PSDKPSta.3/PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dan reklasifikasi masuk dan keluar merupakan koreksi pencatatan barang pada aplikasi SAKTI berupa perubahan Kode Barang pada peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Modul Aset Tetap Nomor : Surat B.481/BMN-PSDKPSta.3/PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp7,750,545,339 dan Rp7,236,950,407. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	7,236,950,407
Mutasi tambah:	513,594,932
Transfer masuk	-
Perolehan KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	513,594,932
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Saldo per 31 Desember 2024	7,750,545,339
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(869,310,934)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	6,881,234,405

Pada tanggal pelaporan, terdapat mutasi tambah sebesar Rp513.594.932 berupa penyelesaian pembangunan pendopo sesuai BAST Nomor: BAST.1747/PHO/PPK1-PSDKPSta.3/PL.430/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp1,942,265,3
92*

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,942,265,392 dan Rp1,942,265,392. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1,942,265,392
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	1,942,265,392
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1,121,162,044)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	821,103,348

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.19 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk 31 Desember 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	0
-	0
Mutasi kurang:	-
-	-
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	98,390,000
Mutasi tambah:	513,594,932
Pengembangan KDP	464,754,932
Perolehan/penambahan KDP	48,840,000
Mutasi kurang:	-611,984,932
Penghapusan/Penghentian KDP	-98,390,000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-513,594,932
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar

Rp0 dan Rp98,390,000. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada TA 2023 sudah ditetapkan penghapusannya sesuai Surat Nomor 134/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 16 Februari 2024 sehingga bernilai 0 pada 2024.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(28,940,427,079)*

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(28,940,427,079) dan Rp(26,830,228,595). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	30,891,161,825	26,949,954,101	3,941,207,724
2	Gedung dan Bangunan	7,750,545,339	869,310,934	6,881,234,405
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,942,265,392	1,121,162,044	821,103,348
Akumulasi Penyusutan		40,583,972,556	28,940,427,079	11,643,545,477

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak ada Aset Tak Berwujud pada Kantor Stasiun PSDKP Kupang. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	0
Jumlah	0

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	-
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	-
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0*

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan dan

Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan
Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			0
Software			0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN Rp0*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp14,608,907*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp14,608,907 dan Rp14,032,807. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang yang ada pada 31 Desember 2024 terdiri dari:

- Tagihan Langganan Listrik bulan Desember 2024 sebesar Rp 9,330,237;
- Tagihan Langganan Telepon bulan Desember 2024 sebesar Rp5,183,270;
- Tagihan Langganan Air bulan Desember 2024 sebesar Rp95,400.

Sedangkan utang yang ada pada 31 Desember 2023 terdiri dari:

- Tagihan Langganan Listrik bulan Desember 2023 sebesar Rp8,661,408 (sudah dibayar);
- Tagihan Langganan Telepon bulan Desember 2023 sebesar Rp4,642,399 (sudah dibayar);
- Tagihan Langganan Air bulan September-Desember 2023 sebesar Rp729,000 (sudah dibayar).

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp12,639,540,447*

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12,639,540,447 dan Rp13,223,492,007. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp6,739,272*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah sebesar Rp6,739,272 dan Rp21,125,383. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,739,272	6,739,272	0.00%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	352,148	100.00%
Pendapatan Denda Lainnya	0	14,033,963	100.00%
Jumlah	6,739,272	21,125,383	68.10%

Pendapatan negara bukan pajak pada periode pembukuan TA 2024 di Stasiun PSDKP Kupang sebesar Rp6,739,272 merupakan pendapatan sewa rumah negara kantor Stasiun PSDKP Kupang bulan Januari-Desember

2024 yang dibayarkan dengan memotong gaji pegawai yang menempati rumah tersebut pada saat pengajuan SPM Belanja Gaji pegawai di tiap bulannya. Sedangkan pada TA 2023, terdapat pendapatan sebesar Rp20,002,171 berupa pendapatan sewa rumah negara kantor Stasiun PSDKP Kupang bulan Januari-Desember 2023 yang dibayarkan dengan memotong gaji pegawai yang menempati rumah tersebut pada saat pengajuan SPM Belanja Gaji pegawai di tiap bulannya dengan total nilai sebesar Rp6,739,272. Selain itu juga terdapat pendapatan denda lainnya yang berasal dari denda sanksi administrasi pelaku usaha perikanan sebesar Rp14.033.963 yang sudah disetorkan langsung ke negara dengan NTPN 964AF7QLUFMB7T0U, dan terdapat Denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp352,148.

Beban

Pegawai

Rp7,050,495,757

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7,050,495,757 dan Rp6,122,856,779. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,251,549,900	2,158,605,880	4.31
Beban Pembulatan Gaji PNS	34,022	35,448	(4.02)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	184,120,410	168,384,288	9.35
Beban Tunjangan Anak PNS	60,166,572	55,943,649	7.55
Beban Tunjangan Struktural PNS	10,800,000	11,160,000	(3.23)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	50,820,000	52,920,000	(3.97)
Beban Tunj. PPh PNS	10,927,443	69,600	15,600.35
Beban Tunjangan Beras PNS	144,043,380	148,651,168	(3.10)
Beban Uang Makan PNS	195,781,000	234,397,000	(16.47)
Beban Tunjangan Umum PNS	88,905,000	94,635,000	(6.05)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-	0	#DIV/0!
Beban Gaji Pokok PPPK	335,072,400	110,654,500	202.81
Beban Pembulatan Gaji PPPK	7,478	2,090	257.80
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	24,537,160	8,098,950	202.97
Beban Tunjangan Anak PPPK	6,890,484	2,277,180	202.59
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	28,980,000	10,350,000	180.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	22,305,360	7,966,200	180.00
Beban Uang Makan PPPK	38,073,000	18,785,000	102.68
Beban Uang Lembur	300,981,000	222,145,000	35.49
Beban Uang Lembur PPPK	44,789,000	18,385,000	143.62
Beban Pegawai (Tunjangan/Khusus Kegiatan)	2,788,774,245	2,635,880,382	5.80
Beban Pegawai (Tunjangan/Khusus Kegiatan) P	462,937,903	163,510,444	183.12
Jumlah	7,050,495,757	6,122,856,779	15.15

*Rincian Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai TA
2024*

URAIAN	Beban	Belanja	Selisih	Pengembalian	F=E-D
A	B	C	D	E	F
Gaji Pokok PNS	2,251,549,900	2,251,549,900	0	-	0
Pembulatan Gaji PNS	34,022	35,258	1,236	1,236	0
Tunjangan Suami/Istri PNS	184,120,410	184,120,410	0	-	0
Tunjangan Anak PNS	60,166,572	60,166,572	0	-	0
Tunjangan Struktural PNS	10,800,000	10,800,000	0	-	0
Tunjangan Fungsional PNS	50,820,000	50,820,000	0	-	0
Tunjangan PPh PNS	10,927,443	10,927,443	0	-	0
Tunjangan Beras PNS	144,043,380	144,043,380	0	-	0
Uang Makan PNS	195,781,000	195,781,000	0	-	0
Tunjangan Umum PNS	88,905,000	89,645,000	740,000	740,000	0
Gaji Pokok PPPK	335,072,400	335,072,400	0	-	0
Pembulatan Gaji PPPK	7,478	7,594	116	116	0
Tunjangan Suami/Istri PPPK	24,537,160	24,537,160	0	-	0
Tunjangan Anak PPPK	6,890,484	6,890,484	0	-	0
Tunjangan Fungsional PPPK	28,980,000	28,980,000	0	-	0
Tunjangan Beras PPPK	22,305,360	22,305,360	0	-	0
Uang Makan PPPK	38,073,000	38,073,000	0	-	0
Uang Lembur	300,981,000	300,981,000	0	-	0
Uang Lembur PPPK	44,789,000	44,789,000	0	-	0
(Tunjangan/Khusus Kegiatan)	2,788,774,245	2,788,774,245	0	-	0
(Tunjangan/Khusus Kegiatan) PPPK	462,937,903	462,937,903	0	-	0
Jumlah	7,050,495,757	7,051,237,109	741,352	741,352	0

Selama periode TA 2024 terdapat pengembalian pembulatan gaji PNS dan PPPK sebesar Rp1,236 dan Rp116, serta pengembalian tunjangan umum PNS

berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor T.1518/PSDKP.1/HP.520/IV/2024 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar tanggal 5 April 2024, bahwa terdapat temuan BPK RI terkait ketidaksesuaian pembayaran Belanja Pegawai atas pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar TA 2024 sebesar Rp555.000. Pengembalian telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024 dengan NTPN EE8D00JUQKU78G0Q sebesar Rp555.000. Selain itu juga terdapat pengembalian tunjangan umum PNS atas kelebihan bayar sebesar Rp185,000 sesuai NTPN nomor ADB560JUQSDRVSE tanggal bayar 30 Desember 2024.

Beban

Persediaan

Rp262,287,106

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp262,287,106 dan Rp234,309,153. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	262,287,106	234,309,153	11.94
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	262,287,106	234,309,153	11.94

*Beban Barang
dan Jasa
Rp9,668,744,928*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9,668,744,928 dan Rp14,190,921,723. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	992,282,497	962,270,941	3.12
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	199,843,012	179,711,134	11.20
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,797,780	6,430,500	(25.39)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	119,928,000	219,576,000	(45.38)
Beban Bahan	6,803,022,115	11,383,479,610	(40.24)
Beban Honor Output Kegiatan	11,000,000	6,610,000	66.41
Beban Barang Non Operasional Lainnya	820,176,020	931,232,136	(11.93)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4,164,250	0	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	182,146,724	144,256,987	26.27
Beban Langganan Telepon	61,019,299	53,813,159	13.39
Beban Langganan Air	79,138,800	60,276,000	31.29
Beban Jasa Konsultan	719,920	0	#DIV/0!
Beban Sewa	199,705,040	43,785,000	356.10
Beban Jasa Profesi	26,400,000	29,800,000	(11.41)
Beban Jasa Lainnya	164,401,471	169,680,256	(3.11)
Jumlah	9,668,744,928	14,190,921,723	(31.87)

Realisasi Belanja Jasa	Nilai
Realisasi Belanja Langganan Listrik	181,477,895
Realisasi Belanja Langganan Telepon	60,478,428
Realisasi Belanja Langganan Air	79,772,400
Realisasi Belanja Jasa Konsultan	719,920
Realisasi Belanja Sewa	199,705,040
Realisasi Belanja Jasa Profesi	26,400,000
Realisasi Belanja Jasa Lainnya	164,401,471
Jumlah Realisasi	712,955,154
Uraian Beban Jasa	Nilai
Beban Langganan Listrik	182,146,724
Beban Langganan Telepon	61,019,299
Beban Langganan Air	79,138,800
Beban Jasa Konsultan	719,920
Beban Sewa	199,705,040
Beban Jasa Profesi	26,400,000
Beban Jasa Lainnya	164,401,471
Jumlah Beban	713,531,254
Penjelasan Selisih	(576,100)
Biaya Tagihan Listrik Bulan Desember 2023 lingkup Stasiun PSDKP Kupang	8,661,408.
Biaya Tagihan Telepon Bulan Desember 2023 Lingkup Stasiun PSDKP Kupang	4,642,399.
Biaya Tagihan Air Bulan Desember 2023 Lingkup Stasiun PSDKP Kupang	729,000.
Tagihan Listrik Bulan Desember 2024 lingkup Stasiun PSDKP Kupang	-9,330,237.
Tagihan Telepon Bulan Desember 2024 Lingkup Stasiun PSDKP Kupang	-5,183,270.
Tagihan Air Bulan Desember 2024 Lingkup Stasiun PSDKP Kupang	-95,400.
Jumlah Selisih	(576,100)

Beban

*Pemeliharaan
Rp2,979,464,96
1*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,979,464,961 dan Rp3,271,057,013. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	270,943,620	303,992,685	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,411,686,549	2,503,600,406	(3.67)
Beban Persediaan Suku Cadang	296,834,792	463,463,922	0.00
Jumlah	2,979,464,961	3,271,057,013	(8.91)

Beban pemeliharaan terdiri atas belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dan belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin serta belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

*Beban
Perjalanan
Dinas*

Rp2,838,815,594

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,838,815,594 dan Rp2,264,998,313. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,345,555,636	1,837,438,026	27.65
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	147,240,000	115,700,000	27.26
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	52,105,000	95,770,000	-45.59
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	293,914,958	216,090,287	36.01
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah	2,838,815,594	2,264,998,313	25.33

URAIAN JENIS BEBAN	BEBAN	BELANJA	SELISIH
Perjalanan Dinas Biasa	2,345,555,636	2,347,176,031	-1,620,395
Perjalanan Dinas Dalam Kota	147,240,000	147,240,000	0
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	52,105,000	52,105,000	0
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	293,914,958	293,939,958	-25,000
	0	0	0
Jumlah	2,838,815,594	2,840,460,989	(1,645,395)

Selama TA 2024 terdapat pengembalian perjalanan dinas pegawai dengan total Rp1,645,395 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Nominal	Tanggal Dibayar	NTPN
Lebih Bayar Belanja Perdin	25,000	11 Juli 2024	E6BC55UFPN1G1594
Lebih Bayar Belanja Perdin	1,620,395	18 Desember 2024	80BAB397AC1ELT6Q
Total Pengembalian	1,645,395		

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban
Bantuan Sosial
Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1,481,701,040*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,481,701,040 dan Rp1,934,127,063. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,145,856,825	1,595,660,936	-28.19
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	152,728,395	138,507,322	10.27
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	183,115,820	180,672,794	1.35
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	19,286,011	-100.00
Jumlah Penyusutan	1,481,701,040	1,934,127,063	-23.39
			#DIV/0!
Beban Amortisasi Software	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,481,701,040	1,934,127,063	(23)

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp9,250. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	9,250	0.00
Jumlah	0	9,250	-100.00

Beban penyisihan piutang tak tertagih adalah beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada akhir periode pelaporan.

*Surplus/
Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(84,629,001)*

D.12 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(84,629,001) dan Rp(76,472,685). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(84,629,001)	(76,472,685)	0.00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	13,760,999	48,888,999	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(98,390,000)	(125,361,684)	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(84,629,001)	(76,472,685)	0

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

- Defisit Pelepasan Aset Non Lancar merupakan akumulasi dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp2,000,999 (berupa hasil lelang aset yang sudah rusak berat, sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 21/14.05/2024-01 tanggal 12 Januari 2024) dan Rp11,760,000 (berupa bongkaran *replating* Kapal Pengawas Hiu Macan 03 dengan Nomor Risalah 1539/09.01/2024-01 tanggal 8 Oktober 2024) serta Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp(98,390,000) (berupa penghapusan KDP sesuai dengan Surat Penetapan Penghapusan KDP Nomor: 134/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 16 Februari 2024).

Pos Luar Biasa **D.13 Pos Luar Biasa**

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp13,223,492,007

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13,223,492,007 dan Rp14,078,319,416.

Defisit LO

Rp(24,359,399,115)
)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(24,359,399,115) dan

Rp(28,073,626,596). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Aset

Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan

Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset

Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi atas

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Reklasifikasi

Rp44,370,800

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi pada persediaan/aset tetap/aset lainnya. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp44,370,800 dan Rp0. Koreksi pada tahun 2024 tersebut adalah nilai koreksi yang muncul karena penyusutan transaksional akibat dari transaksi

reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk aset sesuai pada Surat Nomor B.481/BMN-PSDKPSta.3/PL.110/VI/2024 dan B.482/BMN-PSDKPSta.3/PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 serta Nomor B.2672/PSDKPSta.3/PL.110/XI/2024 tanggal 19 November 2024.

Koreksi Nilai

Aset Non

Revaluasi

Rp98,948,056

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp98,948,056 dan Rp(120,906,308). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada tahun 2024 tersebut merupakan nilai koreksi yang muncul karena penyusutan transaksional akibat dari transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk aset sesuai pada Surat Nomor B.481/BMN-PSDKPSta.3/PL.110/VI/2024 dan B.482/BMN-PSDKPSta.3/PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 serta Nomor B.2144/PSDKPSta.3/PL.110/IX/2024 tanggal 18 September 2024.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	98,948,056
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	98,948,056

Koreksi Lain-Lain Rp9,250

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp9,250 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Pada akhir periode pelaporan 2024 terdapat koreksi lain-lain sebesar Rp9,250 yang merupakan koreksi dari penyisihan piutang tak tertagih atas temuan BPK transaksi TA 2023 berupa pembayaran/pengembalian kelebihan bayar belanja pegawai yang sedang tugas belajar.

Transaksi Antar Entitas Rp23,632,119,449

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23,632,119,449 dan Rp27,339,705,495. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas TA 2024 dan 2023

Transaksi Antar Entitas	TA 2024	TA 2023
Diterima dari Entitas Lain	(22,350,271)	(70,014,382)
Ditagikan ke Entitas Lain	23,654,469,720	27,404,401,127
Transfer Masuk	-	5,318,750
Transfer Keluar	-	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah	23,632,119,449	27,339,705,495

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain

merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode 2024, DDEL sebesar Rp(22,350,271) berasal dari:

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin merupakan hasil lelang peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan 1 Paket inventaris kantor milik Stasiun PSDKP Kupang dalam kondisi rusak berat senilai **Rp2,000,999** dengan Nomor Risalah 21/14.05/2024-01 tanggal 12 Januari 2024 dan hasil lelang bongkaran Replating Kapal Pengawas Hiu Macan 03 senilai **Rp11,760,000** dengan Nomor Risalah 1539/09.01/2024-01 tanggal 8 Oktober 2024;
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yaitu sewa Rumah Negara milik Stasiun PSDKP Kupang sebesar **Rp6,739,272** yang dibayar perbulan pada SPM Gaji (memotong Gaji pegawai yang bersangkutan). Pengenaan sewa rumdin ini berdasarkan pada Surat Keputusan KPA Stasiun PSDKP Kupang Nomor: KEP.016/KPA-PSDKPSta.3/I/2024 Tentang Penetapan Pengguna/Penanggung Jawab Rumah Negara pada Stasiun PSDKP Kupang; dan
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari pengembalian atas temuan BPK berupa kelebihan bayar belanja pegawai yang sedang tugas belajar TA 2023 senilai **Rp1.850,000** dengan NTPN A104E2G4VPICRSJE dengan tanggal bayar 26 April 2024.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode pelaporan 2024 tidak terdapat transfer keluar maupun transfer masuk.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak ada Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tahun 2024 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir

Rp12,639,540,447

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12,639,540,447 dan Rp13,223,492,007.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting yang mengakibatkan *force majeure* bagi UPT Stasiun PSDKP Kupang yang terjadi setelah tanggal Neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. SK Pengelola Anggaran Keuangan pada Stasiun PSDKP Kupang adalah sebagai berikut:

- Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi. sebagai Kepala Stasiun PSDKP Kupang sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Perubahan Ketiga puluh Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.706/KPA-PSDKPSta.3/IX/2024 tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, yaitu:
 - PPK : Christian A. Nauk, S.St.Pi.
 - : Adia Candra, S.AP., M.PA.
 - PPSPM : Fauzan Hidayat, S.Pi., M.M.A.
- Pengangkatan Bendahara Pengeluaran yaitu Ochran E. Ataupah, S.Pi. sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.002/KPA-PSDKPSta.3/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Kupang.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan dengan Keputusan KPA Nomor KEP.004/KPA-PSDKPSta.3/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan Bendahara

Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari 2 orang yaitu:

Satwas SDKP Flores Timur : Paulus Wolo Kleden, A.Md.

Satwas SDKP Sumba Timur : Dionesia Desyana Tokan, S.Pi.

2. Terdapat revisi DIPA anggaran sampai periode TA 2024 sebanyak 5 kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Revisi pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024. Revisi ini untuk menyediakan anggaran cadangan atau Automatic Adjustment dengan cara memblokir Sebagian anggaran yang dimiliki UPT;
- b. Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan I;
- c. Revisi ketiga dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan II;
- d. Revisi keempat dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2024. Revisi ini merupakan revisi kewenangan DJA untuk buka blokir anggaran;
- e. Revisi kelima dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan II;
- f. Revisi keenam dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan III;
- g. Revisi ketujuh disahkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pergeseran antar jenis belanja pada RO Perawatan Armada;
- h. Revisi kedelapan disahkan pada tanggal 06 November 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran POK dan rekomposisi AA

untuk pemenuhan kebutuhan operasi kapal pengawas;

- i. Revisi kesembilan disahkan pada tanggal 19 November 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pergeseran antar RO Non PN, serta antar jenis belanja untuk optimalisasi anggaran;
 - j. Revisi kesepuluh disahkan pada tanggal 11 Desember 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan IV;
 - k. Revisi kesebelas disahkan pada tanggal 27 Desember 2024. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran kewenangan KPA.
3. Terdapat utang pada pihak ketiga di tahun 2024. Adapun utang pihak ketiga tersebut sebagai berikut:
- Tagihan Langganan Listrik bulan Desember 2024 sebesar Rp 9,330,237;
 - Tagihan Langganan Telepon bulan Desember 2024 sebesar Rp5,183,270;
 - Tagihan Langganan Air bulan Desember 2024 sebesar Rp95,400.
4. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 10b/LHP/XVII/05/2022, tanggal 27 Mei 2021 terkait Perencanaan, Penatusahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan, bersama ini kami sampaikan progress temuan Aset Tetap dan Aset Lainnya. Pada Stasiun PSDKP Kupang terdapat 2 temuan dan semua sudah ditindaklanjuti. Adapun rincian temuan sebagai berikut:
- Aset dalam kondisi rusak berat sebanyak 59 NUP sebesar Rp413,073,443. Sudah ditindaklanjuti dengan penghapusan aset rusak berat secara bertahap dengan 3 SK Penghapusan yaitu: 1.) 49 NUP telah keluar SK Penghapusan dengan Nomor

1066/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2022 tanggal 30 Desember 2022; 2.) 2 NUP telah keluar SK Penghapusan dengan Nomor 922/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 tanggal 26 Oktober 2023 (berupa speed boat NUP 1 dan Perahu Karet NUP 1); 3.) 8 NUP telah keluar SK Penghapusan dengan Nomor 260/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 25 Maret 2024;

- Aset Tanah di Flores Timur yang belum memiliki bukti kepemilikan. Sudah ditindaklanjuti dengan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tersebut sudah terbit;
- Aset Gedung dan Bangunan yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah (IMB/PBG) sebanyak 4 Bangunan yaitu 2 Bangunan Kantor di Sumba Timur dan Flores Timur, 1 Bangunan Mess Operator, dan 1 Bangunan Kantor Wilker PSDKP Atapupu. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan bersurat dan berkoordinasi dengan BPN guna mengurus proses penerbitan PBG, dan sampai pada akhir periode pelaporan, sudah terdapat progress berupa telah terbit Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Kegiatan Penerbitan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha Nomor 161/2024 Tanggal 25 Juni 2024.

5. Penjelasan Mengenai Penetapan Status Penggunaan BMN

No	Uraian	Nilai Aset	Sudah PSP	Belum PSP
1	Tanah	313,440,825	313,440,825	-
2	Peralatan dan Mesin	30,909,811,127	30,844,524,777	65,286,350
3	Gedung dan Bangunan	7,771,205,339	7,257,610,407	513,594,932
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,942,265,392	1,942,265,392	-
Jumlah		40,936,722,683	40,357,841,401	578,881,282

Progres Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP) Tahunan per 31 Desember 2024 dari total aset senilai Rp40,936,722,683, yang sudah ditetapkan PSP senilai Rp40,357,841,401. Pada akhir periode pelaporan, terdapat aset belum PSP sebesar Rp578,881,282 yang terdiri dari Rp65,286,350

peralatan dan mesin (14 NUP yang pengadaannya dilakukan di TW IV), dan Rp513,594,932 Gedung dan bangunan (1 NUP yang merupakan bangunan pendopo yang baru terbentuk menjadi aset di bulan Desember).

6. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor T.1518/PSDKP.1/HP.520/IV/2024 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar tanggal 5 April 2024, bahwa terdapat temuan BPK RI terkait ketidaksesuaian pembayaran Belanja Pegawai atas pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar. Pada Stasiun PSDKP Kupang terdapat kelebihan bayar pada Tunjangan Umum pegawai yang sedang tugas belajar di TA 2023 dan 2024 sehingga perlu dilakukan pengembalian atas kelebihan bayar tersebut. Pengembalian telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024 dengan NTPN A104E2G4VPICRSJE sebesar Rp1.850.000 (transaksi 2023) dan NTPN EE8D00JUQKU78G0Q sebesar Rp555.000 (transaksi 2024).
7. Pada periode akhir pelaporan, terdapat Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) Nomor 0002424110024071 diterbitkan oleh Bank BRI dengan nominal setinggi-tingginya Rp19,349,999 sebagai jaminan Bangunan Pendopo yang berlaku mulai tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan 25 April 2025.
8. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan sisa bahan bakar minyak solar dan minyak pelumas Kapal Hiu Macan 03 Nomor 208/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 sisa Bahan Bakar Minyak Solar sebanyak 24.300 liter. Dan sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan sisa bahan bakar minyak solar dan minyak pelumas Kapal Hiu Macan 03 Nomor 527/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XII/2024 tanggal 31 Desember

2024 menjelaskan bahwa sisa BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 03 sebanyak 30.450 liter. Rincian pemakaian BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 03 ditampilkan pada tabel di bawah:

Bulan	Tanggal BBM Awal	Sisa Volume BBM Awal (Liter)	Jumlah Pengisian (Liter)	Pemakaian (Liter)	Tanggal BBM Akhir	Jumlah Sisa BBM Akhir (Liter)	Nomor BA
a	b	c	d	e	f	g = (c+d-e)	
Desember	30 November 2023	41,000	39,050	55,750	29 Desember 2023	24,300	208/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XII/2023
Januari	29 Desember 2023	24,300	-	4,400	31 Januari 2024	19,900	018/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/I/2024
Februari	31 Januari 2024	19,900	20,000	4,200	29 Februari 2024	35,700	039/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/II/2024
Maret	29 Februari 2024	35,700	20,000	37,850	29 Maret 2024	17,850	067/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/III/2024
April	29 Maret 2024	17,850	30,000	450	30 April 2024	47,400	092/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/IV/2024
Mei	30 April 2024	47,400	30,000	36,500	31 Mei 2024	40,900	331/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/V/2024
Juni	31 Mei 2024	40,900	35,000	57,900	28 Juni 2024	18,000	362/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/VI/2024
Juli	28 Juni 2024	18,000	-	-	31 Juli 2024	18,000	376/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/VII/2024
Agustus	31 Juli 2024	18,000	30,000	2,280	31 Agustus 2024	45,720	392/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/VIII/2024
September	31 Agustus 2024	45,720	20,000	46,920	30 September 2024	18,800	411/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/IX/2024
Oktober	30 September 2024	18,800	48,000	45,560	31 Oktober 2024	21,240	444/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/X/2024
November	31 Oktober 2024	21,240	65,000	60,640	29 November 2024	25,600	486/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XI/2024
Desember	29 November 2024	25,600	59,900	55,050	31 Desember 2024	30,450	527/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XII/2024

9. Pada bulan Februari 2025 telah dilaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2024 Stasiun PSDKP Kupang oleh BPK RI dan terdapat temuan pada Pembangunan Konstruksi Pendopo Stasiun PSDKP Kupang sebesar Rp4.775.085,08. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi nilai aset pada aplikasi sakti dan telah dilakukan Pengembalian Belanja Modal TAYL atas Temuan BPK Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Pendopo Stasiun PSDKP Kupang oleh CV. Sahabat Sejati sesuai dengan NTPN 5C2821JNG83RPO98 tanggal 19 Februari 2025 sebesar Rp4.800.000.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 05
SATUAN KERJA : STASIUN PSDKP KUPANG 245160

Tgl Data : 09/05/25 2:10 PM
Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	22,350,271	22,350,271	0	18,000,000	70,014,382	52,014,382	388.97
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	22,350,271	22,350,271	0	18,000,000	70,014,382	52,014,382	388.97
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	22,350,271	22,350,271	0	18,000,000	70,014,382	52,014,382	388.97
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	28,455,309,000	23,654,469,720	(4,800,839,280)	83.13	27,468,440,000	27,404,401,127	(64,038,873)	99.77
1. Belanja Pegawai	7,059,355,000	7,050,495,757	(8,859,243)	99.87	6,125,796,000	6,124,706,779	(1,089,221)	99.98
2. Belanja Barang	16,434,308,000	15,759,095,682	(675,212,318)	95.89	19,972,545,000	19,910,453,618	(62,091,382)	99.69
3. Belanja Modal	4,961,646,000	844,878,281	(4,116,767,719)	17.03	1,370,099,000	1,369,240,730	(858,270)	99.94
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 05
SATUAN KERJA : STASIUN PSDKP KUPANG 245160

Tgl Data : 09/05/25 2:10 PM
Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	28,455,309,000	23,654,469,720	(4,800,839,280)	83.13	27,468,440,000	27,404,401,127	(64,038,873)	99.77
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

KUPANG, 9 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA STASIUN PSDKP KUPANG

NUMAN NAJIB
NIP 198108212003121003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (245160) STASIUN PSDKP KUPANG

Tgl Data : 09/05/25 2:10 PM

Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	4,775,085	1,850,000	2,925,085	158.11
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(23,875)	(9,250)	(14,625)	158.11
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	4,751,210	1,840,750	2,910,460	158.11
Persediaan	697,163,052	642,833,059	54,329,993	8.45
JUMLAH ASET LANCAR	701,914,262	644,673,809	57,240,453	8.88
ASET TETAP				
Tanah	313,440,825	313,440,825	0	0.00
Peralatan dan Mesin	30,891,161,825	29,832,032,976	1,059,128,849	3.55
Gedung dan Bangunan	7,745,770,254	7,236,950,407	508,819,847	7.03
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,942,265,392	1,942,265,392	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	98,390,000	(98,390,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(28,940,379,328)	(26,830,228,595)	(2,110,150,733)	7.86
JUMLAH ASET TETAP	11,952,258,968	12,592,851,005	(640,592,037)	(5.09)
JUMLAH ASET	12,654,173,230	13,237,524,814	(583,351,584)	(4.41)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	14,608,907	14,032,807	576,100	4.11
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14,608,907	14,032,807	576,100	4.11
JUMLAH KEWAJIBAN	14,608,907	14,032,807	576,100	4.11
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	12,639,564,323	13,223,492,007	(583,927,684)	(4.42)
JUMLAH EKUITAS	12,639,564,323	13,223,492,007	(583,927,684)	(4.42)
JUMLAH EKUITAS	12,639,564,323	13,223,492,007	(583,927,684)	(4.42)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12,654,173,230	13,237,524,814	(583,351,584)	(4.41)

Keterangan :
FINAL

KUPANG, 9 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA STASIUN PSDKP KUPANG

NUMAN NAJIB
NIP 198108212003121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (245160) STASIUN PSDKP KUPANG

Tgl Data : 09/05/25 2:10 PM

Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	4,775,085	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	23,875
0.0	117111	Barang Konsumsi	43,566,550	0
0.0	117114	Suku Cadang	653,596,502	0
0.0	131111	Tanah	313,440,825	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	30,891,161,825	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,745,770,254	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,746,823,363	0
0.0	134113	Jaringan	195,442,029	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	26,949,954,101
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	869,263,183
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,113,832,969
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	7,329,075
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	14,608,907
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	23,654,469,720
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	22,350,271	0
0.0	391111	Ekuitas	0	13,223,492,007
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	98,948,056
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	9,250
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	44,370,800
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	13,760,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,739,272
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,251,549,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	34,022	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	184,120,410	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	60,166,572	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	10,800,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	50,820,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	10,927,443	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	144,043,380	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	195,781,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	88,905,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	335,072,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	7,478	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	24,537,160	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	6,890,484	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	28,980,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	22,305,360	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (245160) STASIUN PSDKP KUPANG

Tgl Data : 09/05/25 2:10 PM

Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	38,073,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	300,981,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	44,789,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,788,774,245	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	462,937,903	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	992,282,497	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	199,843,012	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,797,780	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	119,928,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	6,803,022,115	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	11,000,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	820,176,020	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4,164,250	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	182,146,724	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	61,019,299	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	79,138,800	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	719,920	0
3.0	522141	Beban Sewa	199,705,040	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	26,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	164,401,471	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	270,943,620	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,411,686,549	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,345,555,636	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	147,240,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	52,105,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	293,914,958	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,145,856,825	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	152,680,644	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	178,229,770	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	4,886,050	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	262,287,106	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	296,834,792	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	23,875	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	98,390,000	0
JUMLAH			65,996,802,214	65,996,802,214

Keterangan :

FINAL

KUPANG, 9 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA STASIUN PSDKP KUPANG

NUMAN NAJIB
NIP 198108212003121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (245160) STASIUN PSDKP KUPANG

Tgl Data : 09/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	23,654,469,720
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	22,350,271	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	13,760,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,739,272
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,850,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,251,549,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35,258	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	184,120,410	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	60,166,572	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	10,800,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	50,820,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,927,443	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	144,043,380	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	195,781,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	89,645,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	335,072,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,594	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	24,537,160	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,890,484	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	28,980,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	22,305,360	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	38,073,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	300,981,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	44,789,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,788,774,245	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	462,937,903	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	993,222,407	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	199,843,012	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,797,780	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	119,928,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	6,803,022,115	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11,000,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	820,176,020	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4,164,250	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	229,039,505	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	181,477,895	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	60,478,428	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	79,772,400	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN KERJA : (245160) STASIUN PSDKP KUPANG

Tgl Data : 09/05/25 6:25 PM
Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	719,920	0
3.0	522141	Belanja Sewa	199,705,040	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	26,400,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	164,401,471	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	270,943,620	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,411,686,549	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	340,441,586	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,347,176,031	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	147,240,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	52,105,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	293,939,958	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331,283,349	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	407,188,201	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	98,308,260	0
3.0	533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	8,098,471	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,236
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	116
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	939,910
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,620,395
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	25,000
JUMLAH			23,680,146,648	23,680,146,648

Keterangan :
FINAL

KUPANG, 9 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA STASIUN PSDKP KUPANG

NUMAN NAJIB
198108212003121003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN KERJA : (245160) STASIUN PSDKP KUPANG

Tgl Data : 09/05/25 2:10 PM
Tgl Cetak : 09/05/25 10:20 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,739,272	21,125,383	(14,386,111)	(68.099)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,739,272	21,125,383	(14,386,111)	(68.099)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	6,739,272	21,125,383	(14,386,111)	(68.099)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,050,495,757	6,122,856,779	927,638,978	15.15
Beban Persediaan	262,287,106	234,309,153	27,977,953	11.941
Beban Barang dan Jasa	9,668,744,928	14,190,921,723	(4,522,176,795)	(31.867)
Beban Pemeliharaan	2,979,464,961	3,271,057,013	(291,592,052)	(8.914)
Beban Perjalanan Dinas	2,838,815,594	2,264,998,313	573,817,281	25.334
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN KERJA : (245160) STASIUN PSDKP KUPANG

Tgl Data : 09/05/25 2:10 PM
Tgl Cetak : 09/05/25 10:20 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,481,653,289	1,934,127,063	(452,473,774)	(23.394)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	23,875	9,250	14,625	158.108
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	24,281,485,510	28,018,279,294	(3,736,793,784)	(13.337)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(24,274,746,238)	(27,997,153,911)	3,722,407,673	(13.296)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(84,629,001)	(76,472,685)	(8,156,316)	10.666
Pendapatan Pelepasan Aset	13,760,999	48,888,999	(35,128,000)	(71.853)
Beban Pelepasan Aset	98,390,000	125,361,684	(26,971,684)	(21.515)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(84,629,001)	(76,472,685)	(8,156,316)	10.666
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(24,359,375,239)	(28,073,626,596)	3,714,251,357	(13.23)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(24,359,375,239)	(28,073,626,596)	3,714,251,357	(13.23)

Keterangan :
FINAL

KUPANG, 9 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA STASIUN PSDKP KUPANG

NUMAN NAJIB
NIP 198108212003121003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN KERJA : (245160) STASIUN PSDKP KUPANG

Tgl Data : 09/05/25 6:25 PM
Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	13,223,492,007	14,078,319,416	(854,827,409)	(6.07)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(24,359,375,239)	(28,073,626,596)	3,714,251,357	(13.23)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	143,328,106	(120,906,308)	264,234,414	(218.54)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	44,370,800	0	44,370,800	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	98,948,056	(120,906,308)	219,854,364	(181.84)
LAIN-LAIN	9,250	0	9,250	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	23,632,119,449	27,339,705,495	(3,707,586,046)	(13.56)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(583,927,684)	(854,827,409)	270,899,725	(31.69)
EKUITAS AKHIR	12,639,564,323	13,223,492,007	(583,927,684)	(4.42)

Keterangan :
FINAL

KUPANG, 9 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA STASIUN PSDKP KUPANG

NUMAN NAJIB
NIP 198108212003121003